

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL

Antoni Putra. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 49, no. 3 (2019): 276–298.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. “Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut UU No. 30 Tahun 2014.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022).

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Marbun, S.F. *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.

Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Putra, Muhammad Amin. “Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum sebagai Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum Peratun* 3 (2020): 1–18.

Putra, R. “Peran PTUN dalam Pengawasan Administrasi Negara.” *Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 2 (2020): 123–135.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Ridwan, Despan Heryansyah, dan Dian Kus Pratiwi. “Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.” Universitas Islam Indonesia, 2018.

Subekti, M. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2007.

#### **ARTIKEL ONLINE**

Munawaroh, Nafiatul. “7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.”

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/7-asas-hukum-acara-peradilan-tata-usaha-negara-lt62d5370e455c4/>. Diakses 10 April 2026 pukul 18.20 WIB

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*

*Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.*

*Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.*

*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan.*

#### **PUTUSAN PENGADILAN**

*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 39/G/2024/PTUN.SMG.*

*Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 57/G/2022/PTUN.SMG.*